



Monitoring kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidakadilan geografis?

Dalam rangka monitoring kebijakan Cakupan Semesta (Universal Coverage), pertemuan Jaringan Kebijakan Kesehatan di Makassar pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober yang lalu membahas beberapa data menarik:

1. Data mengenai angka kematian neonatal (1990 – 2005) menunjukkan bahwa setelah desentralisasi terjadi pelebaran gap antara kematian bayi di Jawa dengan propinsi Indonesia timur. Diproyeksikan gap akan terus membesar tanpa ada perubahan kebijakan kesehatan yang berarti.
2. Penggunaan pelayanan kedokteran terlihat semakin meningkat, karena benefit package Jamkesmas yang lebar dan tersedianya banyak pelayanan kesehatan di Jawa dan kota-kota besar. Data penggunaan rumahsakit meningkat di daerah yang banyak pelayanan kesehatannya.
3. Berbagai data menunjukkan bahwa penyebaran tenaga dan fasilitas kesehatan di Indonesia buruk sekali.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa penggunaan subsidi ke rumahtangga seperti JPSBK, askeskin dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) telah meningkatkan keadilan sosial ekonomi antara masyarakat miskin dan kaya di Indonesia. Namun jenis subsidi ke

rumahtangga ini dinilai tidak mampu mengurangi ketidakadilan geografis. Masalah ketidakadilan geografis ini menjadi lebih berat apabila Jamkesmas dikembangkan tanpa memperbaiki infrastruktur fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan di daerah sulit, dan biaya operasional yang cukup. Dana Jamkesmas diproyeksikan akan lebih terserap oleh peserta di daerah-daerah dengan akses pelayanan kesehatan yang mudah.

Ada berbagai skenario yang menunjukkan kemungkinan masa depan ketidakadilan sebagai berikut:

Skenario 1:

Jamkesmas dapat terus meningkatkan keadilan sosio-ekonomi antara yang miskin dan yang kaya; sekaligus memperbaiki keadilan geografis.

Skenario 2:

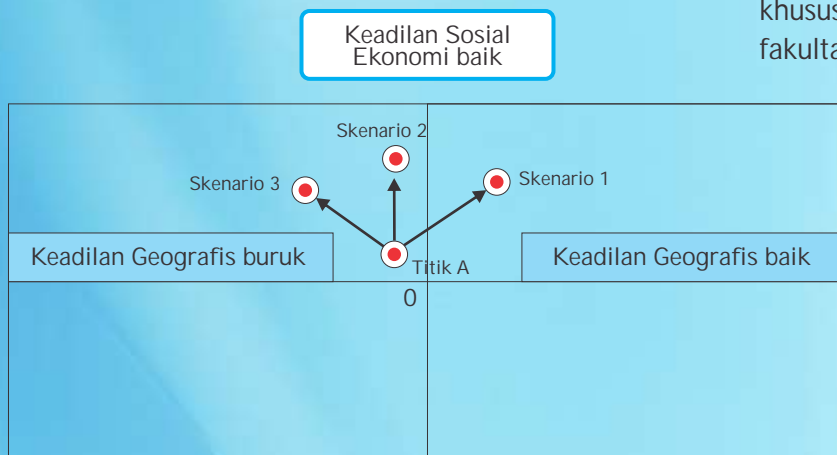
Jamkesmas meningkatkan keadilan sosio-ekonomi antara yang miskin dan yang kaya; namun keadilan geografis tetap buruk.

Skenario 3:

Jamkesmas meningkatkan keadilan sosio-ekonomik antara yang miskin dan yang kaya; namun memperburuk keadilan geografis.

Secara grafis dengan posisi saat ini berada pada titik A, maka ketiga skenario tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kemungkinan terbesar untuk terjadinya ketiga skenario tersebut. Berdasarkan pengamatan, tanpa ada perubahan kebijakan yang mendasar, kemungkinan terbesar adalah pada skenario 3 (skenario terburuk). Dalam skenario ini justru Kebijakan Jamkesmas dapat memperburuk keadilan geografis di Indonesia.

Usulan kebijakan untuk mencegah terjadinya skenario 3 Secara umum, diharapkan Kementerian Kesehatan mempertimbangkan kebijakan yang :

1. Memperkuat Infrastruktur pelayanan kesehatan di daerah-daerah sulit
2. Mendatangkan sumber daya manusia kesehatan untuk melakukan kegiatan langsung ke masyarakat dalam jangka pendek, serta mendidik tenaga kesehatan setempat untuk berbagai jenis tenaga yang dibutuhkan. Kebijakan ini memerlukan penerimaan peserta didik secara affirmative (memberi peluang

husus ke calon dari daerah sulit) di fakultas kedokteran dan kesehatan.

3. Memberikan biaya operasional khusus karena unit-cost penyelenggaraan di daerah sulit sangat mahal. Dana BOK saat ini tidak cukup untuk melakukan kegiatan yang memadai.

4. Perlunya kebijakan *Task shifting* (mendelegasikan kompetensi ke tenaga

kesehatan yang lebih terbatas kemampuannya) untuk berbagai profesi yang dibutuhkan di daerah sulit. Contoh adalah memberikan wewenang melakukan Sectio Cesarean untuk dokter umum dimana dokter spesialis kebidanan dan kandungan tidak ada. Contoh lain adalah kewenangan dokter bedah saraf ke dokter bedah umum.

Disamping itu diharapkan Kementerian Kesehatan memprakarsai kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan Jamkesmas oleh lembaga independen, termasuk mengkaji dampak ekonomi dan aspek etika dari benefit package yang luas.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa perlu kebijakan yang mungkin berbeda antara daerah yang sudah maju dengan yang terpencil. Tanpa pembedaan yang jelas dikhawatirkan skenario ketiga dimana terjadi ketidakadilan geografis yang semakin berat.

Komentar, tanggapan, dan pertanyaan tentang policy brief ini silahkan disampaikan ke: Laksono Trisnantoro, 0811253295 atau trisnantoro@yahoo.com.

Penyusun

dr. Sigit Riyarto, M.Kes
phone: 0811259242
email: sigitriyanto2002@yahoo.com

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D
phone: 0811253295
email: trisnantoro@yahoo.com